

**LAPORAN KEUANGAN &  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)  
Periode Semester 2  
Tahun Anggaran 2023**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

**JL. Kitapa No. 33 Cilame Serang**

Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Semester 2 Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **232/PMK.05/2022** tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan kemudian sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-21/PB/PB.6/2023 perihal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester 2 Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI full module untuk seluruh K/L pada Tahun 2023. maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan Laporan Keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang serta modul general ledger dan Pelaporan/ GLP kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 295/KM.6/2019 tentang Tabel Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat kemudian masa manfaat adalah periode suatu asset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik, adapun rincian laporan keuangan ini meliputi :

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Juli 2023 – 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester Dua Tahun Anggaran 2023 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,- Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 62,763,579,346,- atau mencapai 99 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 63,642,210,000,- Dengan uraian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	-	-	-	-
a. Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-	-
2. HIBAH	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-	-	-
<b>BELANJA</b>				
Belanja Pegawai	1.943.557.000	1.931.190.944	12.366.056	99
Belanja Barang	61.450.244.000	60.587.504.405	862.739.595	99
Belanja Modal	248.409.000	244.883.997	(3.525.003)	-
Hibah	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>63.642.210.000</b>	<b>62.763.579.346</b>	<b>871.580.648</b>	<b>99</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	-
Pembiayaan Luar Negeri	-	-	-	-
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	-	-	-	-

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, dan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 dengan Jumlah Aset sebesar Rp. 28.431.176.716,- dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 28.431.176.716,- kemudian Nilai Kewajiban dan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas seluruhnya tersaji sebesar Rp. 28.431.176.716,- dengan uraian sebagai berikut :

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas Lainnya dan Setara Kas	22.687.288.000
Persediaan	3.827.491.643
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>26.514.779.643</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Tanah	954.557.996
Peralatan dan Mesin	4.335.377.072
Akumulasi Penyusutan	(3.385.152.995)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.904.782.073</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	
Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR	49.199.200
<i>Tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR (netto)</i>	<i>(49.199.200)</i>
<b><i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tunjungan Ganti Rugi (netto)</i></b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	
Aset tak berwujud	39.820.000
Aset Lain-lain	815.523.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(843.828.000)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>11.515.000</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>28.431.076.716</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
Utang kepada Pihak Ketiga	-
Uang Muka dari KPPN	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGAN PENDEK</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
Ekuitas	28.431.176.716
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>28.431.176.716</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>28.431.176.716</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional merupakan gambaran dari keseluruhan pengeluaran dan penerimaan berupa pengeluaran operasional perkantoran sehari – hari yang terdiri dari jumlah pendapatan operasional sebesar Rp. 0,- kemudian jumlah beban operasional Rp. 61.283.975.402,- dan surplus(deficit) dari kegiatan operasional Rp. (61.283.975.402,-) kemudian surplus(deficit) dari kegiatan non operasional Rp. 0,- ditambah surplus(deficit) dari pos luar biasa sebesar Rp. 0,- sehingga surplus/(deficit)-LO menjadi sebesar Rp. (61.283.975.402,-) dengan uraian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	
PNBP Lainnya	-
Pendapatan BLU	-
Pendapatan Hibah	-
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Pegawai	1.894.881.444
Beban Persediaan	2.690.100
Beban Barang dan Jasa	55.707.851.763
Beban Pemeliharaan	148.895.620
Beban Perjalanan Dinas	3.093.428.226
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-
Beban Hibah	-
Beban Bantuan Sosial	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	436.228.249
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-
Beban Lain-lain	-
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>61.283.975.402</b>
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(61.283.975.402)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	-
<b>Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>-</b>
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>-</b>
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>-</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	
Pendapatan Luar Biasa	-
Beban Luar Biasa	-
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	<b>(61.283.975.402)</b>

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas yang terjadi dalam periode Semester 2 Tahun 2023. Terdiri dari Ekuitas awal sebesar Rp. 2.071.431.825,- kemudian terdapat surplus/(defisit)-LO sebesar Rp. (61.283.975.402,-) kemudian koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Rp. 0,- ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. 87.643.720.293,- kemudian terdapat kenaikan/penurunan entitas sebesar Rp. 26.359.744.891 maka menjadi ekuitas akhir senilai Rp. 28.431.176.716,- dengan uraian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>2.071.431.825</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(61.283.975.402)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>-</b>
Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Lainnya	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>87.643.720.293</b>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS</b>	<b>26.359.744.891</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>28.431.176.716</b>

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### **A.1 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERANG**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **232/PMK.05/2022** tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berkedudukan di Jalan Kitapa Nomor 33 Serang, mempunyai tugas dan fungsi dalam memfasilitasi Kegiatan operasional KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan menyusun laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Sekretariat KPU Kabupaten Serang berkomitmen dengan visi “*mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan dan berkualitas.*”

## **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui **Aplikasi SAKTI**.

### **A.3 Basis Akuntansi**

Sekretariat KPU Kabupaten Serang menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Akuntansi dan pelaporan berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4 Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat KPU Kabupaten Serang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan adalah sebagai berikut:

### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Sekretariat KPU Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan  
*(Kementerian Negara.Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing)*
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

#### **(5) Aset**

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### **c. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan

penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **d. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada

saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

#### (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang

untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 295/KM.6/2019 tentang Tabel Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat kemudian masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan public. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 2.

*Tabel 2*

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### **(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2021 yang berbasis akuntansi kas menuju akrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**B.1 Pendapatan**

Pendapatan Negara dan Hibah Komisi Pemilihan Umum terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain dengan Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini:

*Tabel 3*

No	Uraian	Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	Naik (Turun) %
1	Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	-

Berdasarkan Tabel 4 Perbandingan Realisasi Semester 2 Tahun Anggaran 2023 dengan Semester 2 Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebagai berikut :

*Tabel 4*

No	URAIAN	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik/(Turun)	
				Selisih	%
1	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	91.449.152	(91.449.152)	-
<b>Jumlah</b>		-	<b>91.449.152</b>	<b>(91.449.152)</b>	-

**B.2. Belanja**

Realisasi belanja Sekretariat KPU Kabupaten Serang pada Semester 2 TA 2023 terdiri dari belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Hibah sesuai dengan Rincian Anggaran dan realisasi belanja Semester 2 TA 2023 tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Naik (Turun)%
1	Belanja Pegawai	1.943.557.000	1.931.190.944	99
2	Belanja Barang	61.450.244.000	60.587.504.405	99
3	Belanja Modal	248.409.000	244.883.997	99
<b>Jumlah</b>		<b>63.642.210.000</b>	<b>62.763.579.346</b>	<b>99</b>

Berdasarkan tabel 5 diatas bahwa Realisasi Belanja naik dikarenakan beberapa kemungkinan diantaranya yaitu bahwa untuk periode rentang waktu antara 1 Juli sd 31 Desember 2023, dengan rincian perbandingan sebagaimana tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6

No	URAIAN JENIS BELANJA	SMT 2 T.A. 2023	SMT 2 T.A. 2022	Naik/(Turun)	
				Selisih	%
1	Belanja Pegawai	1.931.190.944	1.812.686.108	118.504.836	7
2	Belanja Barang	60.587.504.405	2.012.713.938	58.574.790.467	2.910
3	Belanja Modal	244.883.997	101.488.000	143.395.997	-
4	Pinjaman dan Hibah	0		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>62.763.579.346</b>	<b>3.926.888.046</b>	<b>58.836.691.300</b>	<b>2.917</b>

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Serang pada Semester 2 Tahun Anggaran 2023 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Tabel 7

No	URAIAN JENIS BELANJA	SMT 2 T.A. 2023	SMT 2 T.A. 2022	Naik/(Turun)	
				Selisih	%
1	Belanja Gaji Pegawai	1.931.190.944	1.812.686.108	118.504.836	6,54
<b>Jumlah</b>		<b>1.931.190.944</b>	<b>1.812.686.108</b>	<b>118.504.836</b>	<b>6,54</b>

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester 2 Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan uraian pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8

No	URAIAN JENIS BELANJA	SMT 2 T.A. 2023	SMT 2 T.A. 2022	Naik (Turun)	
				Selisih	%
1	Belanja Barang	60.587.504.405	2.012.713.938	58.574.790.467	2.910,24
<b>Jumlah</b>		<b>60.587.504.405</b>	<b>2.012.713.938</b>	<b>58.574.790.467</b>	<b>2.910,24</b>

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester 2 Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 9

No	URAIAN JENIS BELANJA	SMT 2 T.A. 2023	SMT 2 T.A. 2022	Naik/(Turun)	
				Selish	%
1	Belanja Modal	244.883.997	101.488.000	143.395.997	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>244.883.997</b>	<b>101.488.000</b>	<b>143.395.997</b>	<b>100,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Aset Lancar

Aset lancar dapat berupa Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) untuk mendukung kegiatan dinas operasional sehari-hari di lingkungan KPU Kabupaten Serang dengan nilai sebagai berikut :

No	Uraian	Smt 2 T.A. 2023	Smt 2 T.A. 2022	Naik/(Turun)	
				Selish	%
	<b>ASET LANCAR</b>			-	-
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	22.687.288.000	0	22.687.288.000	
2	Persediaan	3.827.491.643	0	3.827.491.643	
	<b>Jumlah</b>	<b>26.514.779.643</b>	<b>-</b>	<b>26.514.779.643</b>	

### C.2. Aset Tetap

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin kemudian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap, pada periode akhir Semester 2 Tahun 2023 tidak terdapat penambahan aset dengan uraian sebagai berikut

Tabel 10

No	Uraian	Smt 2 T.A. 2023	Smt 2 T.A. 2022	Naik/(Turun)	
				Selish	%
1	Tanah	954.557.996	954.557.996	-	-
2	Peralatan Mesin	4.335.477.072	4.090.593.075	244.883.997	5,99
3	Akumulasi Penyusutan	(3.385.152.995)	(2.959.919.746)	(425.233.249)	14,37
	<b>Jumlah</b>	<b>1.904.882.073</b>	<b>2.085.231.325</b>	<b>(180.349.252)</b>	<b>(8,65)</b>

#### C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 adalah Rp 954.557.996,- dengan rincian tanah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2023</b>	<b>954.557.996</b>
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>954.557.996</b>
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2023	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>954.557.996</b>

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo asset berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah Rp 4.335.477.072,- .

Nilai dan mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>4.090.593.075</b>
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.335.477.072</b>
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2023	(3.385.152.995)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>921.755.402</b>

### C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca

Pada periode Semester 2 TA 2017 Terdapat Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp 75.166.500,- berupa ganti rugi kehilangan 1 unit kendaraan operasional daihatsu xenia yang belum selesai pembayarannya adapun Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang kemudian masih akan berlanjut di periode tahun-tahun selanjutnya sampai dengan selesai dibayar lunas, sebagaimana tabel dibawah ini. Kemudian pada periode Semester 2 TA 2023 setelah di input berdasarkan data-data yang ada sisa TGR berkurang menjadi Rp. 49.199.200

Tabel 11

No	Uraian	Smt 2 T.A. 2023	Smt 2 T.A. 2022	Naik/(Turun)	
				Selisih	%
1	Piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/tTGR	49.199.200	49.199.200	-	-
2	Penyisihan hutang tidak tertagih-tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR	(49.199.200)	(49.199.200)	-	(100,00)

### C.4. Aset Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah berupa barang yang sudah dihentikan penggunaannya karena rusak atau tidak dapat digunakan sebagai mana fungsinya dan sedang menunggu persetujuan untuk dapat dilelang melalui KPKNL Serang, setelah

konsultasi dan koordinasi dengan KPKNL Serang sebelum melakukan penjualan tersebut diharuskan untuk melakukan PSP (Penetapan Status Pengguna) terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 12

No	Aset lainnya	Smt 2 T.A. 2023	Smt 2 T.A. 2022	Naik (Turun)	
				Selisih	%
1	Aset tak berwujud	39.820.000	39.820.000		
2	Aset lain-lain	815.523.000	815.523.000	0	0
3	Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya	(843.828.000)	(832.833.000)	-10.995.000	1

Akumulasi Penyusutan merupakan aset yang sudah tidak dapat digunakan dalam operasional harian perkantoran karena sudah mengalami kerusakan sehingga dihentikan penggunaannya dan disimpan digudang penyimpanan barang.

### C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek berupa utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 0,-

### C.6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Ekuitas	28.431.176.716	2.071.431.825	26.359.744.891	1.273
	Jumlah	28.431.176.716	2.071.431.825	26.359.744.891	1.273

## D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1.Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO

Pendapatan PNBPN-LO merupakan hak pemerintah atas pendapatan PNBPN karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas negara. Rincian pendapatan PNBPN-LO disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik(Turun)	
				Selisih	%
1	PNBP	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

### D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan biaya yang dikeluarkan oleh satker untuk membayarkan upah atau honor pegawai yg ada dilingkungannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 15

No	Uraian	Smt 1 TA 2023	Smt 1 TA 2022	Naik/(Turun)	
				Selisih	%
1	Beban Pegawai	1.894.881.444	1.848.995.608	45.885.836	2,48
<b>Jumlah</b>		<b>1.894.881.444</b>	<b>1.848.995.608</b>	<b>45.885.836</b>	<b>2,48</b>

### D.3. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 16

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				Selisih	%
1	Beban Persediaan	2.690.100	0	2.690.100	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.690.100</b>	<b>0</b>	<b>2.690.100</b>	<b>-</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Tabel 17

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik/(Turun)	
				selisih	%
1	Barang dan Jasa	55.707.851.763	948.476.997	54.759.374.766	5.773
<b>Jumlah</b>		<b>55.707.851.763</b>	<b>948.476.997</b>	<b>54.759.374.766</b>	<b>5.773</b>

### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 18

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Pemeliharaan	148.895.620	251.315.630	(102.420.010)	(41)
<b>Jumlah</b>		<b>148.895.620</b>	<b>251.315.630</b>	<b>(102.420.010)</b>	<b>(41)</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Tabel 19

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				Selisih	%
1	Perjalanan Dinas	3.093.428.226	812.921.311	2.280.506.915	281
Jumlah		<b>3.093.428.226</b>	<b>812.921.311</b>	<b>2.280.506.915</b>	<b>281</b>

#### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Baban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk asset tak berwujud.

Tabel 20

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Penyusutan dan amortisasi	436.228.249	544.937.958	(108.709.709)	(20)
Jumlah		<b>436.228.249</b>	<b>544.937.958</b>	<b>(108.709.709)</b>	<b>(20)</b>

#### D.8. Beban Operasional

Merupakan akumulasi keseluruhan beban pada Tahun atau periode semester yang sudah berjalan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				Selisih	%
1	Beban Operasional	61.283.975.402	4.406.647.504	56.877.327.898	1.291
Jumlah		<b>61.283.975.402</b>	<b>4.406.647.504</b>	<b>56.877.327.898</b>	<b>1.291</b>

#### D.9. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Difisit)dari kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	selisih	%
1	Surplus/(defisit) dari kegiatan operasional	(61.283.975.402)	(4.406.647.504)	(56.877.327.898)	1.291
	<b>Jumlah</b>	<b>(61.283.975.402)</b>	<b>(4.406.647.504)</b>	<b>(56.877.327.898)</b>	<b>1.291</b>

#### D.10. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Yaitu berupa hasil pendapatan penjualan dari pemindahtanganan/ Penjualan bmn yang sudah mendapatkan ijin dari eselon 1 untuk dihapuskan dengan mekanisme Lelang melalui KPKNL Serang sebagai berikut :

Tabel 23

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Surplus/(defisit) dari Pemindahtangan BMN	0	0	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.11. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/deficit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas dengan rincian sebagai berikut

Tabel 24

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	-	91.449.152	(91.449.152)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>91.449.152</b>	<b>(91.449.152)</b>	<b>-</b>

#### D.12. Suplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan tidak dapat diramalkan, serta berada di luar kendali entitas.

Tabel 25

No	Uraian	Smt 1 TA 2023	Smt 1 TA 2022	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Pos luar biasa	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Surplus/(Defisit) - LO (Laporan Operasional)

Surplus/(Defisit) LO Laporan Operasional Semester 2 Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 26

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 1 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Surplus/(Defisit)-LO	(61.283.975.402)	(4.315.198.352)	(56.968.777.050)	1.320
	<b>Jumlah</b>	<b>(61.283.975.402)</b>	<b>(4.315.198.352)</b>	<b>(56.968.777.050)</b>	<b>1.320</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 27

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Ekuitas awal	2.071.431.825	2.551.191.283	(479.759.458)	(18,81)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.071.431.825</b>	<b>2.551.191.283</b>	<b>(479.759.458)</b>	<b>(18,81)</b>

### E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/deficit kegiatan non operasional dan pos luar biasa

Tabel 28

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Suplus/Defisit-LO	(61.283.975.402)	(4.315.198.352)	(56.968.777.050)	1.320,19
	<b>Jumlah</b>	<b>(61.283.975.402)</b>	<b>(4.315.198.352)</b>	<b>(56.968.777.050)</b>	<b>1.320,19</b>

### E.3. Koreksi Lain-lain

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar atau Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Tabel 29

Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
			Selisih	%
Koreksi kumulatif perubahan kebijakan akuntansi korek yang menambah/mengurangi ekuitas	-	-	-	#DIV/0!

#### E.4. Transaksi antar Entitas

Transaksi antar entitas pada periode Semester 2 Tahun 2023 dengan rincian berupa ditagihkan ke entitas lain kemudian diterima dari entitas lain kemudian terdapat transfer masuk dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 30

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				Selisih	%
1	Transaksi antar entitas	87.643.720.293	3.835.438.894	83.808.281.399	2.185
<b>Jumlah</b>		<b>87.643.720.293</b>	<b>3.835.438.894</b>	<b>83.808.281.399</b>	<b>2.185</b>

#### E.5. Kenaikan/Penurunan Entitas

Kenaikan/Penurunan Entitas Semester 2 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31

No	URAIAN	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(26.359.744.891)	(463.198.660)	(25.896.546.231)	5.591
<b>Jumlah</b>		<b>(26.359.744.891)</b>	<b>(463.198.660)</b>	<b>(25.896.546.231)</b>	<b>5.591</b>

#### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada Semester 2 Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 32

No	Uraian	Smt 2 TA 2023	Smt 2 TA 2022	Naik (Turun)	
				selisih	%
1	Ekuitas Akhir	28.431.176.716	2.071.431.825	26.359.744.891	1.272,5
<b>Jumlah</b>		<b>28.431.176.716</b>	<b>2.071.431.825</b>	<b>26.359.744.891</b>	<b>1.272,5</b>

### E. Pengungkapan Lain Lain

#### F.2.1 Informasi Rekening SATKER

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023
1	651896580421000	BPG 020 KPU KABUPATEN SERANG	0
2	0050108745154	RPL 020 PDHL KPU KAB SERANG UTK 2ACEAVEA	22.687.288.000
3	65409658042290	RPL 020 KPU KAB SERANG	0

### F.2.2 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Serang Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Peubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Serang Nomor 1 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Anggaran 076 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Sekretaris Nomor 50.1 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

Adapun susunan Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ade Wahyu Margono S.Sos  
 Pejabat Pembuat Komitmen : Tata Jumanta  
 Perjabat Penandatanganan SPM : Diah Novianti  
 Bendahara Pengeluaran : Dian Seputri  
 PPABP : Madali  
 Staf Pengelola : Irfan Said Wiranata  
 Staf Pengelola : Melisa Siburian  
 PPBJ : Lestari Hotmaida Sianturi

KPU Kabupaten Serang  
 Sekretaris,  
  
 Ade Wahyu Margono